

ANALISIS SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI KABUPATEN JAYAWIJAYA**Risky Novan Ngutra¹***qikinovan@yahoo.com***Boy Piter Nizu Kekry²***kekryboy@gmail.com***Abstrak**

SKPG merupakan sistem yang tepat digunakan oleh pemerintah daerah karena SKPG merupakan sistem pengelolaan informasi pangan dan gizi dalam rangka menetapkan kebijakan program pangan dan gizi. Selain itu, informasi pangan dan gizi dapat dipakai untuk menetapkan kebijakan dan tindakan segera terutama dalam keadaan krisis pangan dan gizi. Berdasarkan kenyataan ini analisis kerawanan pangan melalui kajian SKPG sangat penting artinya bagi upaya pencegahan terjadinya beberapa dampak negatif dari kerawanan pangan, terutama agar berbagai program dengan sumberdaya terbatas dapat betul-betul efektif, efisien dan tepat sasaran dalam menanggulangi masalah kerawanan pangan. Metode Analisa yang diterapkan dalam Kajian SKPG ini, terdiri atas (1) Analisis SKPG, dengan menggunakan analisa rasio dan indeks komposit; (2) Analisis Deskriptif. Hasil analisis yang diperoleh pada umumnya data-data terkait dengan ketersediaan pangan I cukup lengkap, dimana teridentifikasi hanya terdapat 12 distrik yang memiliki data dasar dari 40 distrik di Kabupaten Jayawijaya. Selain itu di distrik pemekaran data dasar masih banyak yang belum tersedia. Terkait dengan analisa data, ada sebagian komoditi yang tidak dapat diukur tingkat produktifitasnya, misalkan komoditi ubi jalar (*hipere*). Hal ini dikarenakan sesuai dengan budaya mereka, panen dilakukan dengan cara mengambil sebagian tanaman untuk konsumsi hari itu, sisanya masih disimpan didalam tanah (*lambung hidup*). Kekurangan data pada lokasi penelitian di Dinas Pertanian, Badan Ketahanan Pangan Daerah, maupun BPS di Kabupaten Jayawijaya disebabkan kurang koordinasinya antara Tenaga Penyuluh Lapangan dengan Badan Ketahanan Pangan Daerah dan Dinas Pertanian. Selain itu kurangnya hubungan yang harmonis antara BKP Daerah dengan tenaga penyuluh lapangan di masing-masing di distrik.

Kata Kunci: *Ketahanan Pangan, SKPG, Komoditi*

PEDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar dalam pembangunan nasional, yang menjadi salah satu barometer tegaknya suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Sebagaimana yang tertuang pada Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Kerawanan pangan kronis dan transient merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ketahanan pangan. Sehingga, ketika kondisi pangan

¹ Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih..

² Asisten Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih.

bagi negara sampai dengan perorangan tidak terpenuhi maka kondisi yang akan terjadi adalah kondisi kerawanan pangan, sehingga kerawanan pangan dapat diartikan adalah kondisi tidak tersedianya pangan yang cukup bagi individu/perorangan untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Selanjutnya dalam rangka mendukung terwujudnya ketahanan pangan, diperlukan instrumen yang tepat untuk analisis kerawanan pangan, salah satunya adalah instrumen untuk mendeteksi potensi kejadian rawan pangan baik kronis maupun transien. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) adalah salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mendeteksi kondisi rawan pangan kronis.

Sejak tahun 2010, pelaksanaan SKPG (Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi) berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi. SKPG dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) dibawah Dewan Ketahanan Pangan (DKP), yang beranggotakan dinas-dinas terkait dengan ketahanan Pangan, antara lain, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Kantor Statistik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan sebagainya). Output kegiatan SKPG terdiri dari analisis bulanan dan tahunan yang digambarkan dalam kondisi rawan, waspada dan tahan. Sedangkan indikatornya dilihat dari aspek ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan.

Dalam upaya mengimplementasikan SKPG di setiap daerah kabupaten/kota maka pemerintah daerah mempunyai kewajiban penanganan urusan ketahanan pangan yang terkait dengan SKPG yaitu: (1) Melakukan Identifikasi kelompok rawan pangan di Kabupaten Jayawijaya; (2) Melakukan penanganan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan; (3) Melakukan penyegahan dan pengendalian serta penanggulangan masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan, mutu, gizi, ketersediaan dan keamanan pangan; (4) Melakukan pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan Kabupaten untuk penyusunan Kebijakan ketahanan pangan Tingkat Provinsi dan Nasional. SKPG merupakan sistem yang tepat digunakan oleh pemerintah daerah karena SKPG merupakan sistem pengelolaan informasi pangan dan gizi dalam rangka menetapkan kebijakan program pangan dan gizi. Selain itu, informasi pangan dan gizi dapat dipakai untuk menetapkan kebijakan dan tindakan segera terutama dalam keadaan krisis pangan dan gizi. Dalam keadaan normal, informasinya dapat dipakai untuk pengelolaan program pangan dan gizi jangka panjang.

Berdasarkan kenyataan ini analisis kerawanan pangan melalui kajian SKPG sangat penting artinya bagi upaya pencegahan terjadinya beberapa dampak negatif dari kerawanan pangan, terutama agar berbagai program dengan sumberdaya terbatas dapat betul-betul efektif, efisien dan tepat sasaran dalam menanggulangi masalah kerawanan pangan. Sejalan dengan desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah terjadi perubahan dalam penentuan prioritas program pada tingkat wilayah khususnya pemerintah tingkat kabupaten/kota. Perubahan ini secara tidak langsung mempunyai dampak terhadap kinerja program dalam penanganan rawan pangan di wilayah tersebut. Oleh sebab itu dalam rangka

mendukung kegiatan analisis kerawanan pangan, perlu dilakukan kajian yang diharapkan menghasilkan sebuah dokumen yang memiliki posisi sekaligus peran penting sebagai salah satu alat komunikasi yang cukup berpengaruh dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Mencermati Fenome yang terjadi pada beberapa bencana kelaparan sepertinya merupakan suatu siklus yang tidak pernah berhenti di Provinsi Papua. Setiap tahunnya selalu diberitakan adanya puluhan atau ratusan orang yang menderita kelaparan, bahkan sampai menimbulkan kematian di provinsi yang kaya akan sumber daya alamnya ini. Kasus kelaparan hingga merengut kematian yang terjadi di Provinsi Papua selama ini lebih banyak disebabkan karena adanya bencana alam. Dari tahun 2005 sampai dengan 2015 misalkan, cuaca yang sangat ekstrim berupa curah hujan yang tinggi terus menerus dan adanya hujan es (salju) mengakibatkan gagal panen (puso) tanaman umbi-umbian yang merupakan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk di wilayah Papua, terutama di daerah-daerah pegunungan. Salah satu wilayah kabupaten yang paling sering mengalami kasus kelaparan akibat cuaca ekstrim adalah Kabupaten Yahukimo. Di tahun 2005, 2009 dan 2012, tercatat bencana kelaparan selalu melanda wilayah ini. Beberapa orang dikabarkan mati karena kurang mendapat asupan makanan dan gizi, serta kelaparan berhari-hari lamanya. Penyebab kelaparan adalah persoalan cuaca, curah hujan dan kabut yang cukup lama, akibatnya sejumlah tanaman umbi-umbian yang menjadi sumber makanan penduduk tidak bisa tumbuh, atau mengalami kerusakan dan gagal panen.

Begitu juga dengan Kabupaten Paniai yang mengalami bencana kelaparan di tahun 2007, Kabupaten Intan Jaya tahun 2011, Kabupaten Puncak tahun 2012, Kabupaten Mimika tahun 2014, dan yang paling terakhir di tahun 2015 ini menyerang 3 (tiga) kabupaten sekaligus yakni Kabupaten Nduga, Lanny Jaya dan Puncak. Semuanya itu diakibatkan karena penduduk lokal gagal panen (puso), oleh karena curah hujan yang lebat terus menerus, serta hujan es berhari-hari membuat tanaman umbi-umbian menjadi rusak, isinya berair, yang kemudian menjadi kering sehingga tidak dapat dikonsumsi dan beracun. Kerusakan tanaman juga disebabkan bencana longsor yang menghancurkan lahan, karena hujan yang tidak berhenti, sehingga masyarakat mengalami kesulitan untuk memanen umbi-umbian makanan pokoknya.

Ironisnya, karena infrastruktur yang kurang memadai pada topografi yang sangat sulit dilalui menyebabkan bantuan kemanusiaan untuk bencana kelaparan di Provinsi Papua tersebut sering kali terhambat, sehingga pertolongan pertama terhadap penduduk yang kelaparan mengalami kegagalan. Akibatnya banyak ditemukan kematian karena terlambatnya pemberian bantuan makanan. Pada umumnya, bencana kelaparan yang berujung pada kematian banyak terjadi di daerah-daerah pegunungan dan terisolir yang sangat sulit diakses oleh transportasi udara dan darat. Kalaupun ada rute penerbangan ke daerah tersebut, dipastikan biaya angkutannya sangat mahal. Sebagai contoh di Distrik Homeyo, Distrik Wandai, dan Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya, ketika terjadi bencana kelaparan di tahun

2011, bantuan pangan yang seharusnya segera dikirimkan tertahan di Nabire (bandar udara pengumpan di wilayah pegunungan utara) karena biaya angkutnya sangat mahal, dimana untuk carter pesawat kecil dalam satu kali penerbangan pulang pergi ke daerah-daerah tersebut membutuhkan biaya sebesar Rp. 26 juta, sementara kebutuhan untuk mengangkut bantuan bahan makanan dapat berkali-kali penerbangan karena muatannya mencapai puluhan ton. Terkait dengan berbagai kondisi faktual di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan spesifik dalam studi ini sebagai berikut: (1) bagaimana kondisi kerawanan pangan pada kabupaten Jayawijaya berdasarkan instrumen SKPG, (2) apakah indikator-indikator SKPG yang ada sudah sesuai dengan kondisi faktual kabupaten Jayawijaya, (3) tindak lanjut apa yang perlu disampaikan berdasarkan hasil evaluasi kerawanan pangan kronis?

METODE PENELITIAN

Lokasi Studi

Wilayah studi Instrumen SKPG, dilaksanakan pada Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan secara garis besarnya terdiri atas data sekunder dan data primer. Data sekunder yang dibutuhkan merupakan data dan informasi yang terkait dengan Analisa SKPG antara lain mencakup:

1. Luas tanam komoditi padi, jagung, ubi jalar, ubi kayu
2. Luas panen komoditi padi, jagung, ubi jalar, ubi kayu
3. Luas puso komoditi padi, jagung, ubi jalar, ubi kayu
4. Cadangan Pangan
5. Harga Komoditas Pangan (Beras, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Gula, minyak goreng, daging ayam, telur)
6. Angka Balita Ditimbang (D)
7. Angka Balita Naik Berat Badan (N)
8. Balita yang tidak naik berat badannya dalam 2 kali penimbangan berturut-turut (2T)
9. Angka Balita Dengan Berat Badan Dibawah Garis Merah (BGM)
10. Kasus gizi buruk yang ditemukan
11. Jumlah KK dengan anggota keluarga yang menjadi tenaga kerja ke luar daerah,
12. penjualan aset,
13. penjarahan hutan,
14. perubahan pola konsumsi pangan,
15. perubahan cuaca

16. Produksi setara beras
17. Cadangan pangan pemerintah
18. Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I
19. Jumlah tindak kejahatan setempat,
20. Indikator-indikator makroekonomi wilayah lainnya seperti perkembangan Indeks Pembangunan Manusia, Nilai Tukar Petani, jumlah penduduk tengah tahunan.

Adapun data primer dalam kajian ini adalah data yang diliput langsung pada narasumber atau informan dengan menggunakan metode tertentu yang bertujuan untuk menggali dan memperoleh informasi yang terkait dengan kesesuaian instrumen-instrumen SKPG di wilayah setempat, keberadaan lembaga Tim Pokja SKPG, koordinasi antar SKPD, dan sebagainya. Data dan informasi yang dibutuhkan diliput dari berbagai institusi dan informan yang terkait dengan SKPG antara lain dari Tim Pokja SKPG Provinsi dan Kabupaten, BPS, BKP, BULOG, Dinas Kesehatan, Dinas Perindagkop, Kementerian Kesehatan, BKKBN, Kepolisian Daerah. Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data-data sekunder adalah metode kepustakaan yaitu dengan cara meliput dan mengumpulkan data dan informasi yang telah dipublikasikan oleh institusi yang relevan dan berkompeten. Sedangkan untuk data-data primer ditelusuri dengan cara indepth interview menggunakan seperangkat kuesioner yang bersifat terbuka.

Metode Analisa

Metode Analisa yang diterapkan dalam Kajian SKPG ini, terdiri atas (1) Analisis SKPG: Analisis SKPG bulanan dan tahunan disajikan berdasarkan tiga jenis indikator: (a) aspek ketersediaan, (b) aspek akses pangan, dan (c) aspek pemanfaatan pangan. Pengukuran masing-masing aspek tersebut menggunakan analisa rasio dan indeks komposit; (2) Analisis Deskriptif: Metode deskriptif diterapkan untuk menganalisis kesesuaian instrumen SKPG yang telah ditetapkan dengan kondisi faktual yang ada pada masing-masing wilayah sesuai dengan hasil FGD atau wawancara mendalam, yang mana hal ini akan dilengkapi sebelumnya dengan penyusunan matriks kesesuaian.

PEMBAHASAN

Sistem Kerawanan Pangan dan Gizi merupakan suatu instrumen yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian yang ditertuang pada Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman SKPG, dalam rangka mendeksi secara dini mengenai potensi terjadinya kerawanan pangan di suatu daerah. Bentuk kongkrit dari upaya ini adalah, diharapkan adanya POKJA SKPG yang terbentuk di Kabupaten/Kota. Review mengenai kinerja dari suatu POKJA SKPG, berdasarkan hasil studi lapangan di Kabupaten Jayawijaya, menunjukkan beberapa kondisi yang belum sejalan dengan harapan yang ingin dicapai. POKJA SKPG

memainkan peran yang sangat strategis mengenai deteksi dini situasi kerawanan pangan di cakupan wilayah pada suatu kabupaten.

Pengorganisasian Pelaksanaan SKPG

Mencermati hasil observasi lapangan mengenai POKJA SKPG pada Kabupaten Jayawijaya, terdapat beberapa isu permasalahan yang perlu untuk segera disikapi oleh Pemerintah Daerah setempat mengenai persoalan/kendala-kendala kelembagaan, antara lain:

- Belum tersedianya regulasi daerah dalam bentuk SK/PERBUB/PERDA, mengenai kelembagaan POKJA SKPG.
- Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala pada POKJA SKPG, hal ini diperkuat dengan sulitnya dukungan pembiayaan dari APBD untuk kegiatan ini.
- Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih minim terkait pengelolaan instrumen SKPG, secara khusus pemahaman mengenai pengelolaan data dan informasi.
- Lemahnya dukungan peningkatan kapasitas staf pada tingkat Kabupaten/Kota, melalui peran dan fungsi tingkat Provinsi.
- Rendahnya komitmen Kabupaten/Kota dalam menjalankan peran dan fungsi POKJA SKPG.

Pemrosesan Data Dalam Rangka Pelaksanaan SKPG

Data dan informasi merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan dalam pendekatan instrumen SKPG, melalui hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa instansi teknis seperti Dinas Pertanian/Badan Ketahanan Pangan belum maksimal menghimpun data kebutuhan SKPG. Secara umum terdapat beberapa temuan penting terkait pemrosesan data SKPG, antara lain:

- Pelaksanaan persiapan dan penghimpunan kebutuhan data masih dilakukan oleh beberapa staf, yang notabene merupakan staf pada instansi Dinas Pertanian/Badan Ketahanan Pangan.
- Lemahnya koordinasi yang intens terhadap Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), sehingga peranan PPL terkait pemrosesan data dan informasi masih belum sempurna baik secara cakupan waktu maupun lokasi.
- Belum terlaksananya pertemuan reguler POKJA SKPG, sehingga pemrosesan data belum maksimal melibatkan instansi/SKPD/Organisasi lainnya yang terlibat dalam urusan kerawanan pangan dan gizi.
- Belum terbangunnya model koordiansi lintas sektoral mengenai tatacara pengimpunan data dan informasi SKPG dari berbagai sumber.
- Pemahaman masyarakat yang tergolong tradisional, masih memainkan peran terkait belum optimalnya pemrosesan data dan informasi pada masing-masing indikator SKPG.

Pengumpulan Data Berdasarkan Pelaksanaan Kegiatan SKPG

Salah satu tujuan dalam POKJA SKPG ialah merangkul beberapa instansi terkait mengenai isu kerawanan pangan dan gizi menjadi isu bersama yang perlu ditanggulani secara kebersamaan. Agenda pertemuan reguler menjadi salah satu strategi dalam hal koordinasi dan komunikasi kebutuhan data maupun langkah-langkah teknis pendokumentasian. Namun kondisi tersebut belum berjalan sesuai pedoman yang berlaku, melalui hasil kunjungan lapangan dan mencermati temuan-temuan lapangan maka terdapat beberapa isu permasalahan yang sepatutnya segera di tindak lanjuti, antara lain:

- Ketergantungan Dinas Pertanian/Badan Ketahanan Pangan, terhadap Badan Pusat Statistik cukup tinggi, hal ini ditunjukkan dengan seluruh manajemen data pertanian hanya bergantung kepada statistik pertanian. Belum muncul kesadaran yang tinggi dari instansi teknis yang memiliki peran utama terkait persoalan pangan dan gizi.
- Masih adanya ego sektoral yang cukup tinggi, sehingga aliran data yang bersumber dari beberapa instansi/SKPD/Organisasi yang terkait dengan SKPG, belum terdokumentasi dengan maksimal.
- Data kebutuhan SKPG belum mencakup kondisi per distrik, mayoritas kondisi data masih menggambarkan kondisi Kabupaten/Kota.
- Belum adanya mekanisme manajemen data SKPG yang sesuai dengan konteks daerah

Penyimpanan Data Berdasarkan Pelaksanaan SKPG

Penyimpanan Data dasar SKPG sepatutnya dilaksanakan dengan standar yang baku, pengarsipan data merupakan salah satu konsep manajemen data yang saat ini dikembangkan dalam rangka perlindungan terhadap kondisi data dan informasi yang telah didokumentasikan. Persoalan yang sering terjadi, terkait hal penyimpanan data yang berjalan kurang maksimal ialah data tidak terkonsentrasi pada suatu wadah, sehingga mempersulit proses pengolahan dan analisis. Melalui observasi lapangan dan proses wawancara kepada *key informan*, memberikan petunjuk bahwa terdapat kendala-kendala mendasar, antara lain:

- Keterbatasan fasilitas pendukung penyimpanan data dan informasi SKPG pada tingkat Kabupaten/Kota.
- Ketersediaan data dasar yang saat ini terhimpun, disimpan dan dikelola oleh beberapa personal, hal ini akan berpotensi sulitnya pihak lain untuk dapat mengakses data dan informasi kebutuhan analisis SKPG.

Analisis Data Berdasarkan Pelaksanaan SKPG

Dalam pedoman yang telah disediakan, menginformasikan bahwa POKJA SKPG sepatutnya melakukan kajian sistem kerawanan pangan dan gizi bersifat bulanan dan tahunan. Sesuai dengan tujuan dari SKPG ini dalam rangka mendeteksi secara dini mengenai potensi kerawanan pangan berdasarkan indikator ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Maka analisis bulanan cenderung lebih tepat digunakan sebagai analisis utama dalam mengapai tujuan POKJA SKPG. Namun melalui studi lapangan yang telah dilakukan, mendapatkan situasi umum yang terjadi pada kabupaten/kota sebagai berikut:

- Kabupaten/Kota belum melaksanakan analisis mengenai indikator SKPG baik bulanan maupun tahunan.
- Kecenderungan informasi mengenai analisis pangan dan gizi, masih diperoleh dan didukung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota.
- Masih terdapat beberapa komoditas lokal, yang belum disepakati pada tingkatan provinsi/pusat untuk dapat dijadikan komoditas pangan maupun cadangan pangan.
- Banyaknya pemekaran distrik baru, memberikan sumbangsi terhadap sulitnya ketersediaan data yang mengakibatkan analisis data berdasarkan cakupan waktu dan lokasi semakin sulit.

Analisa Kesesuaian Indikator SKPG Di Kabupaten Jayawijaya

Tahapan ini ditujukan untuk melakukan review terhadap kesesuaian indikator dengan kondisi ketersediaan data dan informasi pada masing-masing indikator berdasarkan cakupa wilayah yakni pada distrik induk maupun distrik pemekaran dengan total seluruh distrik sebanyak 40 distrik.

Ketersediaan Pangan

Tabel 1.
Kesesuaian Data Ketersediaan Pangan Luas Tanam

No.	Luas Tanam	Ketersediaan data		Keterangan
		Cakupan Wilayah	Cakupan Waktu	
1.	Padi	Ada, tidak lengkap	Ada, tidak lengkap	Tidak semua distrik, dan tidak tiap bulan
2.	Jagung	Ada, tidak lengkap, dianggap tidak relevan digunakan	Ada, tidak lengkap, dianggap tidak relevan digunakan	Jagung bukan merupakan salah satu makanan pokok penduduk, sehingga dianggap tidak relevan digunakan
3.	Ubi Kayu	Ada, tidak lengkap	Ada, tidak lengkap	Tidak semua distrik, dan tidak tiap bulan
4.	Ubi Jalar	Ada, tidak lengkap	Ada, tidak lengkap	Tidak semua distrik, dan tidak tiap bulan

Sumber: Hasil Studi Lapangan, 2015

Tabel 2.
Kesesuaian Data Ketersediaan Pangan Luas Puso

No.	Luas Puso	Ketersediaan data		Keterangan
		Cakupan Wilayah	Cakupan Waktu	
1.	Padi	Tidak ada	Tidak ada	Kurangnya koordinasi antara tenaga PPL untuk selalu memberi informasi mengenai luas puso padi
2.	Jagung	Tidak ada, dan dianggap tidak relevan digunakan	Tidak ada, dan dianggap tidak relevan digunakan	Jagung bukan merupakan salah satu makanan pokok penduduk, sehingga dianggap tidak relevan digunakan
3.	Ubi Kayu	Tidak ada	Tidak ada	Kurangnya koordinasi antara tenaga PPL untuk selalu memberi informasi mengenai luas puso ubi kayu
4.	Ubi Jalar	Tidak ada	Tidak ada	Kurangnya koordinasi antara tenaga PPL untuk selalu memberi informasi mengenai luas puso ubi jalar

Sumber: Hasil Studi Lapangan, 2015

Tabel 3.
Kesesuaian Skor Ketersediaan Pangan

No.	Hasil Analisis SKPG	Tidak Sesuai
1	Luas tanam rata-rata 5 tahun pada bulan berjalan	√
2	Luas tanam rata-rata 5 tahun pada bulan berjalan	√
3	Indeks Ketersediaan	√

Sumber: Hasil Studi Lapangan, 2015

Pada umumnya data-data terkait dengan ketersediaan pangan I cukup lengkap, dimana teridentifikasi hanya terdapat 12 distrik yang memiliki data dasar dari 40 distrik di Kabupaten Jayawijaya. Selain itu di distrik pemekaran data dasar masih banyak yang belum tersedia. Kemudian untuk periode data bulanan dan tahunan juga tidak banyak tersedia. Terkait dengan analisa data, ada sebagian komoditi yang tidak dapat diukur tingkat produktifitasnya, misalkan komoditi ubi jalar (hipere). Hal ini dikarenakan sesuai dengan budaya mereka, panen dilakukan dengan cara mengambil sebagian tanaman untuk konsumsi hari itu, sisanya masih disimpan didalam tanah (lumbung hidup).

Salah satu kebutuhan data ketersediaan pangan II yakni kondisi luas puso setiap komoditas, terutama padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Data-data tersebut tidak tersedia di Dinas Pertanian, Badan Ketahanan Pangan Daerah, maupun BPS di Kabupaten Jayawijaya. Hal ini lebih banyak disebabkan kurang koordinasinya antara Tenaga Penyuluh Lapangan dengan Badan Ketahanan Pangan Daerah dan Dinas Pertanian. Sepatutnya tenaga penyuluh lapangan memberikan dan me-update data-data puso setiap waktu kepada BKP Daerah, namun hal ini tidak berjalan baik disebabkan kurangnya hubungan yang

harmonis antara BKP Daerah dengan tenaga penyuluh lapangan di masing-masing di distrik. Tenaga penyuluh lapangan beranggapan selama ini tidak pernah diberikan insentif, sehingga lahan yang teridentifikasi Puso tidak mau didata oleh tenaga penyuluh tersebut. Berdasarkan kondisi data yang telah dikumpulkan, maka aspek luas tanam untuk komoditas padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar hanya tersedia untuk beberapa distrik, sedangkan data aspek luas puso komoditas pangan belum dapat tersedia. Hal ini berdampak kepada indeks komposit ketersediaan pangan yang tidak dapat terbentuk nilai indeks.

Akses Pangan

Akses masyarakat terhadap beberapa komoditas antara lain: Beras Kualitas Sedang, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Gula, Minyak Goreng Curah, dan Daging Ayam, merupakan suatu kondisi dimana kemampuan masyarakat dalam mengkonsumsi beberapa komoditas yang telah dicantumkan dalam instrument SKPG. Dalam pengukuran mengenai akses pangan menggunakan indikator harga. Tentunya kita sangat memahami, kondisi perkembangan harga di Kabupaten Jayawijaya cukup tinggi jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Provinsi Papua yang relative mudah untuk diakses. Kondisi infrastruktur dan geografis daerah menjadi salah satu penentu akses pangan di kawasan Jayawijaya ini.

Tabel 4.
Kesesuaian Data Akses Pangan

No.	Aspek Akses Pangan	Ketersediaan data		Keterangan
		Cakupan Wilayah	Cakupan Waktu	
1.	Beras Kualitas Sedang	Ada, dan lengkap	Ada, tidak lengkap	Tidak tiap bulan
2.	Jagung	Ada, tidak lengkap, dianggap tidak relevan digunakan	Ada, tidak lengkap, dianggap tidak relevan digunakan	Jagung bukan merupakan salah satu makanan pokok penduduk, sehingga dianggap tidak relevan digunakan
3.	Ubi Kayu	Ada, dan lengkap	Ada, tidak lengkap	Tidak tiap bulan
4.	Ubi Jalar	Ada, dan lengkap	Ada, tidak lengkap	Tidak tiap bulan
5.	Gula	Ada, dan lengkap	Ada, tidak lengkap	Tidak tiap bulan
6.	Minyak Goreng Curah	Ada, dan lengkap	Ada, tidak lengkap	Tidak tiap bulan
7.	Daging Ayam	Ada, dan lengkap	Ada, tidak lengkap	Tidak tiap bulan

Sumber: Hasil Studi Lapangan, 2015

Tabel 5
Kesesuaian Skor Akses Pangan

No.	Hasil Analisis SKPG	Sesuai
1.	Persentase perubahan harga komoditas	√
2.	Indeks Komposit Akses Pangan	√

Sumber: Hasil Studi Lapangan, 2015

Pada dasarnya kesesuaian data akses pangan I, menunjukkan kondisi harga setiap komoditas pangan. Terkait kebutuhan data dasar akses pangan bulanan terdapat kelemahan mengenai ketersediaan data harga bulanan. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan bahwa data belum dapat diperoleh melalui instansi terkait baik DISPERINDAG maupun BULOG. Sehingga untuk mengantisipasi kebutuhan data ini, maka dilakukan estimasi mengenai kondisi data harga akses pangan. Untuk kesesuaian data harga akses pangan untuk komoditas beras kualitas sedang, jagung, ubi kayu, ubi jalar, gula, minyak goreng, daging ayam, telur. Maka, berdasarkan aspek akses pangan di Kabupaten Jayawija untuk 40 distrik terbentuk skor komposit sebesar 4 dengan nilai indeks akses (IA) sebesar 1. Hal ini menandakan bahwa secara umum pada wilayah distrik di kabupaten jayawijaya aman terhadap rawan pangan. Ini dipengaruhi oleh adanya stabilitas harga yang relatif cukup baik.

Pemanfaatan Pangan

Ketersediaan pangan bahkan kecukupan ketersediaan pangan, tergambar pada tabel 6 dan tabel 7. Pada tabel 6 menunjukkan pemanfaatan pangan oleh masyarakat di Kabupaten Jayawijaya. Sedangkan untuk tabel 7 menunjukkan indek komposit pemanfaatan pangan.

Tabel 6.
Kesesuaian Data Pemanfaatan Pangan I

No.	Aspek Pemanfaatan Pangan	Ketersediaan data		Keterangan
		Cakupan Wilayah	Cakupan Waktu	
1.	S (Jumlah Balita Terdaftar)	Ada, dan lengkap	Ada, tidak lengkap	Tidak setiap distrik ada datanya, dan tidak tiap bulan
2.	D (Jml Balita Ditimbang)	Ada, tidak lengkap	Ada, tidak lengkap	Tidak setiap distrik ada datanya, dan tidak tiap bulan
3.	N (Jml Balita Naik BB)	Ada, dan lengkap	Ada, tidak lengkap	Tidak setiap distrik ada datanya, dan tidak tiap bulan

Sumber: Hasil Studi Lapangan, 2015

Tabel 7.
Kesesuaian Data Pemanfaatan Pangan I

No.	Hasil Analisis SKPG	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
1.	Indeks Komposit Pemanfaatan Pangan	√		Tidak lengkap untuk semua distrik, dan tidak tiap bulan

Sumber: Hasil Studi Lapangan, 2015

Indikator lainnya dalam melihat situasi kerawanan pangan adalah situasi pangan dan gizi adalah aspek pemanfaatan pangan. Hasil dari pemanfaatan/penyerapan pangan merupakan gambaran dari status gizi seseorang terutama pada anak-anak. Dalam hal ini indikator status gizi balita yang dinilai di masing-masing Distrik yang dikumpulkan setiap bulan melalui kegiatan penimbangan di posyandu yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya. Berdasarkan hasil perhitungan melalui kondisi data aspek pemanfaatan pangan terlihat pada 40 distrik untuk data Jumlah Balita Terdaftar, Jumlah Balita Ditimbang, Jumlah Balita Naik, Jumlah Balita BGM, Jumlah Balita Tidak Naik masih belum cukup memadai untuk dilakukan perhitungan indeks komposit aspek pemanfaatan pangan. Terdapat beberapa distrik yang memiliki data mengenai data pemanfaatan pangan antara lain Wamena, Asolokobal, Bolakme, Hom-Hom, Hubikosi, Kurulu, Musafak, Pelebaga, Walelagama, Asologaima, Wollo, dan Yalengga.

Ketiga indikator digabung (dikompositkan) menjadi satu informasi situasi pangan dan gizi wilayah. Dari hasil penggabungan ketiga indikator tersebut diperoleh hasil bahwa situasi pangan dan gizi. Untuk indeks komposit ketersediaan pangan, dan indeks komposit pemanfaatan pangan belum dapat terbentuk nilai bobot dan indeks disebabkan dukungan data dasar yang kurang cukup lengkap. Sedangkan untuk indeks komposit akses pangan dapat terbentuk nilai indeks namun masih menggunakan data estimasi yang bersifat sementara. Sehingga secara keseluruhan indeks komposit kerawanan pangan Kabupaten Jayawijaya belum dapat terbentuk dengan sempurna.

PENUTUP

Simpulan

- a. Kondisi kerwanan pangan berdasarkan analisa SKPG menunjukkan beberapa kondisi yang belum sejalan dengan harapan yang ingin dicapai. Hal ini dapat tergambarkan Kabupaten Jayawijaya belum melaksanakan analisis mengenai indikator SKPG baik bulanan maupun tahunan. Kecenderungan informasi mengenai analisis pangan dan gizi, masih diperoleh dan didukung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jayawijaya. Masih terdapat beberapa komoditas lokal, yang belum disepakati pada tingkatan kabupaten/provinsi/pusat untuk dapat dijadikan komoditas pangan maupun cadangan pangan daerah. Banyaknya pemekaran distrik baru, memberikan sumbangsi terhadap sulitnya ketersediaan data yang mengakibatkan analisis data berdasarkan cakupan waktu dan lokasi semakin sulit.
- b. Berdasarkan indikator SKPG teridentifikasi hanya terdapat 12 distrik yang memiliki data dasar dari 40 distrik di Kabupaten Jayawijaya. Selain itu di distrik pemekaran data dasar masih banyak yang belum

tersedia. Kemudian untuk periode data bulanan dan tahunan juga tidak banyak tersedia. Terkait dengan analisa data, ada sebagian komoditi yang tidak dapat diukur tingkat produktifitasnya, misalkan komoditi ubi jalar (hipere). Hal ini dikarenakan sesuai dengan budaya mereka, panen dilakukan dengan cara mengambil sebagian tanaman untuk konsumsi hari itu, sisanya masih disimpan didalam tanah (lambung hidup). Selain itu berdasarkan hasil perhitungan melalui kondisi data aspek pemanfaatan pangan terlihat pada 40 distrik untuk data jumlah balita terdaftar, jumlah balita ditimbang, jumlah balita naik, jumlah balita BGM, jumlah balita tidak naik masih belum cukup memadai untuk dilakukan perhitungan indeks komposit aspek pemanfaatan pangan. Terdapat beberapa distrik yang memiliki data mengenai data pemanfaatan pangan antara lain Wamena, Asolokobal, Bolakme, Hom-Hom, Hubikosi, Kurulu, Musafak, Pelebaga, Walelagama, Asologaima, Wollo, dan Yalengga.

- c. Diperlukan Tim Pokja SKPG di kabupaten Merauke dan Tim Pembina Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi serta membuat laporan pengendalian dalam semesteran dan tahunan secara berjenjang. Untuk mengetahui efektivitas penanganan rawan pangan di Kabupaten Merauke melalui intervensi, dan dapat dilakukan melalui pemantauan secara bertahap dan berkelanjutan.

Saran

- a. Proses pengumpulan data mengenai indikator ketersediaan pangan, maka BKP Kabupaten Jayawijaya perlu intens melakukan koordinasi dan update data dengan BPS, BULOG, Dinas Pertanian.
- b. Proses pengumpulan data mengenai akses pangan, maka BKP Kabupaten Jayawijaya perlu intens melakukan koordinasi dan update data dengan BPS, Badan Pemberdayaan Perempuan & KB, DISPERINDAKOP Kabupaten Jayawijaya.
- c. Sedangkan untuk kebutuhan data pada indikator pemanfaatan pangan, maka dinas kesehatan banyak berkontribusi pada indikator ini. Untuk itu data mengenai puskesmas, PUSTU, Posyandu mengenai pelayanan data jumlah bayi, balita gizi buru

DAFTAR PUSTAKA

- Baliwati, Yayuk Farida, dkk. 2004. *Pengantar Pangan dan Gizi*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Badan Bimas Ketahanan Pangan (BBKP). 2001. *Petunjuk Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi*. Departemen Pertanian. Jakarta.
- BPS Kabupaten Jayawijaya, BAPPEDA Kabupaten Jayawijaya, (2015), *Jayawijaya Dalam Angka*, BPS Kabupaten Jayawijaya.
- Dewan Ketahanan Pangan dan World Food Programme. 2005. *Peta Ketahanan Pangan Indonesia (A Food Insecurity of Indonesia)*. Jakarta
- Hardinsyah, D Briawan. 1994. *Penilaian dan Perencanaan Konsumsi Pangan*. Bogor : Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Hardinsyah dkk. 2002. *Analisis Kebutuhan Konsumsi Pangan*, Pusat Studi Kebijakan Pangan dan Gizi (PSKPG) Institut Pertanian Bogor.

- Husodo, Siswono Yudo dan Tien R. M. 2004. *Alternatif Solusi Permasalahan Dalam Ketahanan Pangan dalam Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Junaidi. 1997. *Pendapatan rumahtangga nelayan pada musim yang berbeda kaitannya dengan pola konsumsi pangan dan status gizi*. [Tesis]. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Khomsan A. 1997. *Kerangka Pikir Ketahanan Pangan. Pangan dan gizi dalam Dimensi Kesejahteraan*. Bogor. Jurusan Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Rumah Tangga. Insntitut Pertanian Bogor.
- Nainggolan, Kaman. 2007. *Membangun Kemandirian Pangan Berbasis Pedesaan*. <http://www.sinarharapan.co.id>. Diakses tanggal 5 Maret 2008.
- Nuhfil H. 2007. *Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Pangan*. Lecture. Brawijaya.ac.id
Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa Dalam Rangka Otonomi Menuju Desa Mandiri Tahun 2013.
- Saliem, M Ariani, Y Malisa dan TB Purwanti, 2002 *Analisis Kerawanan Pangan Wilayah dalam Perspektif Pembangunan*, Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.
- Sanjur, D. 1982. *Social and Cultural Perspectives in Nutrition*. Prentice. New York.
- Sukandar D. 2007. *Studi Sosial Ekonomi, Aspek Pangan, Gizi dan Sanitasi : Petani Daerah Pasang Surut di Barito Kuala Kalimantan Selatan*. Bogor : Institut Pertanian Bogor.
- Sitorus, M. T. Felix. 1998. *Penelitian Kualitatif Suatu Perkenalan*. Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu Sosial, Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian IPB.
- Suryana, Achmad. 2004. *Ketahanan Pangan di Indonesia dalam Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Usman, Sunyoto. 2010. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekirman. 1994. *Ilmu Gizi dan Aplikasinya untuk Keluarga dan Masyarakat*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.
- [WKNPG] Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi. 2004. *Ketahanan Pangan dan Gizi Di Era Otonomi Daerah dan Globalisasi*. Jakarta: LIPI.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996. tentang *Pangan*.